

PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Oleh: Abd. Ghofur

Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Email : ghofur06@yahoo.com

Abstrak

Pembangunan masyarakat perlu perencanaan, karena membutuhkan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam penjabarannya di tingkat pusat dikenal dengan RPJP, RPJM, dan RKP. Sedangkan di tingkat propinsi dan kabupaten atau kota dikenal RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pembangunan di suatu daerah dikatakan terencana apabila pembangunan mempertimbangkan aneka akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan seimbang diterima oleh semua komponen atau kelompok masyarakat kaya-miskin, tua-muda, laki-laki-perempuan, berdaya-tak berdaya, difabel-non-difabel, masyarakat biasa-masyarakat adat tertinggal dan sebagainya. Dalam proses pembangunan semestinya mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, permasalahan dari beragam kelompok masyarakat.

Kata Kunci: *Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat*

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara Kepulauan dikelilingi oleh pulau-pulau yang berjumlah 17.480 pulau, dengan total laut sekitar 75 % dari total wilayah Indonesia. Riau adalah termasuk salah satu Propinsi yang memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Persoalan pembangunan dan pengembangan pulau-pulau diperbatasan negara dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi

topik bahasan penting. Hal tersebut karena aktivitas eksploitasi kekayaan alam secara ilegal oleh pihak luar, seperti *illegal logging* dan *illegal fishing*, masih marak terjadi yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Adanya kesamaan budaya dan adat istiadat antara masyarakat di kedua wilayah perbatasan melayu Riau dan Malaysia umpamanya serta faktor kesenjangan ekonomi menyebabkan munculnya mobilitas penduduk untuk bekerja di negara

tetangga (Malaysia) sebagai Tenaga kerja (TKI) baik legal maupun ilegal. Lemahnya sistem pengawasan di kawasan perbatasan menimbulkan potensi rawan terhadap kejahatan lintas negara (*transnasional crime*) seperti narkoba dan perdagangan manusia.

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat bila dicermati, terkait dengan banyak hal di antaranya disebabkan oleh kebijakan pemerintah, seperti perluasan daerah perkotaan yang diikuti dengan perluasan pembangunan fisik dan sarana prasarana lain guna menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan perubahan itu, memungkinkan terjadinya mobilitas masyarakat lebih cepat sehingga orang yang tinggal di suatu pedesaan sekalipun, sudah mulai bisa mengakses informasi lewat berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, seperti koran, majalah, dan televisi. Namun bukan berarti tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil dan terisolasi secara fisik dan kebudayaannya. Masih saja ada beberapa desa terpencil yang karena beberapa alasan, *pertama*, masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil itu sendiri justru mengisolasi diri dari pengaruh kebudayaan luar dengan cara menjaga jarak dengan budaya luar seperti masyarakat suku *akit* yang tersebar di beberapa kabupaten di propinsi Riau, seperti Kabupaten Bengkalis, Meranti, dan Siak. *Kedua*, keadaan geografis yang sulit dihubungkan dengan desa-desa lain atau kota kecil lain sehingga warganya tidak bisa mengakses berbagai fasilitas yang

tersedia. *Ketiga*, kendati satuan wilayahnya mudah dijangkau tetapi na masyarakatnya sendiri tidak mau berinteraksi dengan masyarakat luar karena alasan-alasan menjaga adat-isitiadat yang asli. Tiga ciri tersebut paling tidak bisa menandai pengertian suku terasing atau Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Keterasingan sebuah masyarakat dengan beberapa alasan di atas, sejatinya perlu ditela'ah secara baik dan mendalam oleh pemerintah maupun peneliti. Hal ini mengingat perubahan sebuah masyarakat ke arah yang lebih maju dari berbagai sisi baik nilai, norma, budaya, pembangunan fisik maupun non fisik adalah sebuah keniscayaan. Penelitian tentang masyarakat suku suku Akit di propinsi Riau perlu terus di kembangkan untuk mencari formula yang tepat dalam memberdayakan mereka dari berbagai keteringgalan. Konsep pemberdayaan masyarakat mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat "*people-centered*", *participatory*, *empowering*, and *sustainable*¹ (Friedman, 1998 : 54). Konsep pemberdayaan lebih luas dari hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan, dan lebih banyak untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, bahwa Pulau Rupa merupakan pulau yang diasumsikan sangat di luar jika

¹ Friedman,F,1998, *Empowerment: The Politic of Alternative Development*. (Cambridge: Blackwell), hlm. 54.

dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Jika tidak dikelola secara baik, keberadaannya menjadi sangat rawan. Karena itu setelah dilakukan pemetaan masalah, terdapat dua persoalan penting. *Pertama* berkaitan dengan persoalan kebijakan dan pengembangan pulau Rupert sebagai salah satu pulau terluar, baik dari sisi pembangunan sarana-prasarana, penanganan *illegal logging*, *illegal fishing*, TKI ilegal, narkoba dan obat-obat terlarang, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang-barang ilegal. Beberapa bulan lalu terjadi kasus penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui Pulau Rupert akan diedarkan ke pulau Jawa dan akhirnya empat tersangka komplotan bandar Sabu tertangkap di Polres Dumai. (*Tribun Pekanbaru*, Selasa 17/6/14).

Persoalan *kedua* menarik untuk dilakukan penelitian adalah di pulau Rupert, khususnya di Kecamatan Rupert Utara terdapat suku terasing (suku Akit) yang mendiami desa-desa yaitu Desa Titi Akar, Tanjung Medang, Hutan Ayu dan desa Suka Damai. Pemberdayaan suku *akit* di pulau Rupert ini perlu pendekatan khusus, mengingat kelompok ini banyak mengalami ketertinggalan secara ekonomi, pendidikan, kebudayaan, sistem kepercayaan, dan sistem nilai yang belum dipengaruhi oleh sistem kepercayaan atau agama lain. Kalau pun ada pengaruh sistem nilai dari luar terhadap perilaku kebudayaan masyarakat suku terasing, hal itu belum terjadi secara meluas. Persoalan di atas, menarik dilakukan penelitian berkenaan dengan Kebijakan pembangunan pulau-

pulau terluar dan pemberdayaan suku terasing (*Akit*) di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

Tujuan Penelitian ini *pertama*, Untuk menegenetahui problematika pembangunan yang dilakukan pemerintah di pulau terluar khususnya Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. *Kedua*, Untuk mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat suku terasing (suku akit) di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

Tinjauan Teori

Ada beberapa konsep yang bisa dipakai untuk menjawab permasalahan penelitian di atas yaitu Konsep pulau terluar adalah wilayah yang secara geografis berada paling luar dan berbatasan langsung dengan wilayah perairan/negara lain. Dalam konteks ini secara tidak langsung pulau terluar menjadi wilayah berbatasan langsung dengan negara lain. Berdasarkan konsep tersebut, maka pulau terluar yang menjadi pulau yang berbatasan langsung antara kabupaten Bengkalis dengan Malaysia salah satunya adalah Pulau Rupert.

Pembangunan pulau terluar termasuk pulau Rupert telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar. Adapun tujuan dari pengelolaan pulau-pulau terluar tertuang dalam pasal 2 yaitu : *pertama*, Menjaga keutuhan wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan. *Kedua*,

Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan, *Ketiga*, Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, pembangunan masyarakat perlu perencanaan, karena membutuhkan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam penjabarannya di tingkat pusat dikenal dengan RPJP, RPJM, dan RKP. Sedangkan di tingkat propinsi dan kabupaten atau kota dikenal RPJPD, RPJMD dan RKPD².

Pembangunan di suatu daerah dikatakan terencana apabila pembangunan mempertimbangkan aneka akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan seimbang diterima oleh semua komponen atau kelompok masyarakat kaya-miskin, tua-muda, laki-laki-perempuan, berdaya-tak berdaya, difabel-non-difabel, masyarakat biasa-masyarakat adat tertinggal dan sebagainya. Dalam proses pembangunan semestinya mampu

mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, permasalahan dari beragam kelompok masyarakat yang ada. Hal ini tercermin dalam proses perencanaan RPJMD, Renstra, Renja dan RKPD.

Dalam pengelolaan pembangunan sejatinya menggunakan manajemen berbasis kinerja (MBK) karena di dalamnya ada siklus perencanaan; penganggaran; implementasi kegiatan serta pemantauan dan evaluasi. Metode penganggaran yang menggunakan basis MBK akan mengkaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan diharapkan akan menghasilkan dampak *outcome* (produk hasil) dan *output* (manfaat). Sehingga manfaat dari manajemen berbasis kinerja tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya yang dialokasikan ke masyarakat. Di samping itu juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kinerja pemerintahan karena masyarakat akan memiliki peran kontrol yang besar dalam pencapaian hasil dan manfaat dari pembangunan.

Kemudian untuk menela'ah persoalan pemberdayaan suku *akit*, perlu dikemukakan cara-cara belajar orang asli (*indigenous learning sistem*). Dalam penelitian Francisco terdapat tiga aspek pendekatan yaitu *life cycle complex*, *social control mechanism* dan *ritual* yang diterapkan dalam sistem kepercayaan orang-orang asli. Anak-anak mematuhi pantang-larang yang telah dibuat, mengikuti upacara ritual, dan melakukan tindak-tanduk yang dapat diterima dalam masyarakatnya melalui proses sosialisasi dari keluarga. Mereka

² Rinnusu, *Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah*, (makalah Pelatihan Anggaran Responsif Gender, 2014), hlm. 4

menerima dan mempelajari nilai-nilai dari masyarakat yang dibutuhkan sebagai acuan untuk menempuh kehidupan dalam kelompok masyarakat.³

Ada beberapa kendala perubahan dalam masyarakat, diantaranya *pertama* nilai-nilai kelompok yang statis, sikap dan struktur budaya. Nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi tradisi, fatalisme, takhayul, dan budaya etnosentris. *Kedua*, tradisi mampu membentuk kultur kelompok yang cenderung stabil sekaligus statis dalam kurun waktu yang lama. *Ketiga*, fatalisme dalam pengertian suatu kecenderungan untuk menerima segala keadaan dengan lapang dada. Dan *keempat* adalah budaya etnosentris suatu kecenderungan dari sekelompok orang untuk tak mengindahkan inovasi apapun karena mereka sangat percaya diri pada kultur dan kepercayaan yang telah mereka miliki.⁴

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan masyarakat yang merangkum nilai-nilai sosial-budaya. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “*people-centered*”, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang arah

kebijakannya saat ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep peningkatan kualitas hidup masyarakat material maupun mental⁵. Komunitas suku Akit masih terisolasi, miskin, dan lemah. Sebagaimana lazimnya masyarakat pada umumnya, komunitas Suku ini juga membutuhkan pengembangan diri, dan membutuhkan perubahan. Hal ini tentunya harus memperhatikan hal-hal yang tidak banyak bertentangan dengan adat istiadat mereka. Mengingat sifat dan karakter masyarakat ini termasuk yang menutup diri terhadap hal-hal yang berasal dari luar komunitasnya. Hakikatnya masyarakat manapun membutuhkan perubahan yang lebih baik, baik pengetahuan, keterampilan dan sikap mentalnya.

Ketidakberhasilan pembangunan bisa disebabkan karena pemahaman, pendekatan, dan tujuan yang ingin dicapai, tidak sesuai dengan subyek pembangunan itu sendiri. Pembangunan masyarakat terpencil, hanya dimungkinkan dapat berhasil kalau tokoh-tokoh yang melakukan perubahan itu telah memahami lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan kebudayaan masyarakat, beserta karakter masyarakatnya⁶. Louis Wirth menjelaskan

³ Mohamad Zen, 2006, *Orang Laut: Studi Etnopedagogi*, (Jakarta: Yayasan Bahari Nusantara), hlm. 127.

⁴ Lauer, Robert, 2006, *Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 76

⁵ Friedman, F., 1998, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*.

(Cambridge: Blackwell), hlm. 54.

⁶ Suparlan, Parsudi, 1998, *Orang Sakai di Riau-Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 19.

bahwa masyarakat terasing itu dapat dikelompokkan beberapa kategori. *Pertama*, bercorak majemuk yaitu yang hidup berdampingan dengan golongan-golongan lain yang dominan yang ada dalam masyarakat setempat tetapi mereka tetap mempertahankan ciri-cirinya yang khusus. *Kedua*, bercorak terasimilasi, dan *ketiga*, bercorak mengisolasi diri dari kehidupan masyarakat luas. Karena tidak memiliki kontak-kontak kebudayaan dengan masyarakat luar secara intensif, baik karena alasan diisolasi atau mengisolasi diri. (Suparlan, Pasudi, 1998 : 21).

Suku *akit* tidak bisa dilepaskan dari kajian konsep masyarakat tradisional atau Komunitas Adat Tertinggal (KAT) yang tumbuh dari suatu proses perjalanan waktu yang lama, seperti suku sakai, Talang mamak, suku laut, suku bonai, yang tersebar di propinsi Riau. Terdapat pula suku anak dalam di Jambi, suku Ekagi di Papua, Suku Loitas di NTT; suku Samin di Jawa Tengah, suku Badui di Banten, suku Tengger di pinggiran Gunung Bromo Jawa Timur, suku Gayo di Aceh, suku Dayak Sekadau di Kalimantan Barat.

Metode Penelitian

Desain Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang

diamati⁷. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tradisi penelitian studi Kasus. Karena studi kasus merupakan penelitian empiris yang menyelidiki fenomena kehidupan nyata.

Karakteristik pendekatan kualitatif seperti dijelaskan Lincoln dan Guba berikut ini :1. Latar ilmiah (*natural setting*).2. Manusia sebagai instrumen (*human instrument*).3. Penggunaan pengetahuan yang tidak eksplisit (*utilization of tacit knowledge*). 4. Metode-metode kualitatif (*qualitative methods*). 5. Sampel purposif (*purposive sampling*). 6. Analisis data induktif. 7. Teori berdasarkan data di lapangan (*grounded theory*). 8. Desain penelitian mencuat secara alamiah (*emergent design*). 9. Hasil penelitian berdasarkan negosiasi (*Negotiated outcomes*).10. Cara pelaporan studi kasus (*case study reporting mode*).11. Interpretasi kontekstual 12. Aplikasi temuan tentative.13. Batasan ditentukan focus.14. Keterpercayaan dengan kriteria khusus.⁸

Sasaran penelitian ini masyarakat di kecamatan Rupert Utara umumnya dan suku akit (asli) khususnya yang tersebar di beberapa desa seperti di Desa titi Akar, Desa Tanjung Medang, Desa Tanjung Punak, Desa Kadur, desa Teluk Rhu Desa

⁷ Moelong Lexy, 2000, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya), hlm. 3

⁸ Chaidar Alwasilah, 2002, *Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Pustaka Jaya), hlm. 104-147.

Putri Sembilan, Desa Suka Damai dan desa Hutan Ayu. Fokus penelitiannya adalah untuk menelaah secara mendalam Kebijakan pembangunan Rupert dan pemberdayaan masyarakat suku akit. Sumber data adalah aparat pemerintah, tokoh masyarakat, aparat desa dan tokoh agama, serta tokoh atau batin suku *akit* yang mengenal betul persoalan penelitian. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dari informan, dimana informan dipilih secara purposif atau dengan menggunakan model *snow ball*. Informan dalam penelitian ini nantinya terdiri dari informan pangkal dan informan kunci (*key informan*).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen. Peran peneliti menentukan dalam setiap proses penjarangan data. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses data secepatnya dan memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. (Moelong Lexy, 2000 : 121). Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan berdasarkan pengelompokan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dengan berperan serta (*participant observation*), dan penggunaan dokumen (*documentary used*).

Analisis data melalui tahapan model Mathew dan Huberman karena upaya

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi,⁹. Kategorisasi dan mereduksi; data lalu disusun dalam bentuk narasi-narasi; interpretasi data; kesimpulan dan verifikasi hasil analisis data dengan informan.

Hasil Penelitian

Pulau Rupert memiliki luas 10.852,77 kilometer persegi, berada di ujung barat daya Bengkulu. Pulau ini dibagi menjadi dua kecamatan. Kecamatan Rupert seluas 1.524,85 kilometer persegi dan sisanya Kecamatan Rupert Utara 624.50 kilometer persegi. Pulau rupert merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia melalui selat Malaka yang dekat dengan *Port Dickson* (pelabuhan di Negeri Sembilan), bila menggunakan kapal motor atau *speed boat* hanya 45 menit. Pulau Rupert sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena kapal-kapal asing yang melintas di Selat Malaka bisa langsung merapat ke pulau Rupert. Pulau Rupert juga memiliki pasir putih sepanjang ± 17 Km membentang dari Desa Teluk Rhu, Tanjung Punak (Kecamatan Rupert Utara) sampai sungai Cingam (Kecamatan Rupert). Pantainya sangat lebar ± 30 meter jika air surut atau sekitar ± 7 meter saat air pasang ini memiliki keindahan yang tidak kalah menariknya dengan pantai-pantai di pulau Bali dan Lombok.

⁹ Mathew Miles & Huberman Micahel, 1992, *Analisis data Kualitatif*, terjemahan (Jakarta : UI Press), hlm. 74.

Geografi dan Luas wilayah

Kecamatan Rupert Utara dibentuk pada tanggal 16 Agustus 2001 berdasarkan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2001, dengan Ibu Kota Tanjung Medang dan pemekaran dari Kecamatan Rupert. Kecamatan Rupert Utara luas wilayah 628,50 km² dengan jumlah

penduduk 14.359 jiwa dan menaungi 8 desa, yaitu Desa Tanjung Medang, Teluk Rhu, Kadur, Titi Akar, Tanjung punak, Hutan Ayu dan Suka Damai dan Desa Putri Sembilan. Desa-desa tersebut umumnya berada di pesisir pantai. Data terakhir terdapat 8 desa, 34 RW dan 75 RT di Kecamatan Rupert Utara.

Tabel 1
Luas Wilayah dan jumlah Penduduk

NO	Nama Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1	Desa Titi Akar	300,00 km ²	5.280
2	Desa Tanjung Medang	75,00 km ²	2.463
3	Desa Reluk Rhu	72,50 km ²	2.375
4	Desa Tanjung Punak	66,00 km ²	806
5	Desa Kadur	115,00 km ²	3.435
6	Desa Putri Sembilan	Di Desa Kadur	Di Desa Kadur
7	Desa Suka Damai	Di Desa Titi Akar	Di Desa Titi Akar
8	Desa Hutan Ayu	Di Desa Titi Akar	Di desa Titi Akar
	T o t a l	628,50 km²	14.359

Sumber : BPS Kecamatan Rupert Utara 2013

Kedaaan Demografi dan Pendidikan

Pulau Rupert didiami sebanyak 51.255 orang. Di kecamatan Rupert penduduknya berjumlah 36.896 orang. Sedangkan di kecamatan Rupert Utara penduduknya berjumlah 14.359 jiwa. Data penduduk ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk yang tinggal di kecamatan Rupert lebih banyak dua pertiga dari pada jumlah penduduk kecamatan Rupert Utara. Hal ini mengingat bahwa luas Kecamatan Rupert juga lebih luas dari pada kecamatan Rupert Utara. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting

untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat. Pendidikan juga menjadi faktor penggerak bagi masyarakat untuk terjadinya perubahan cara hidupnya yang lebih baik dalam pola tingkah laku, sistem ekonomi, sistem sosial, dan lainnya.

Penduduk di kecamatan Rupert Utara yang dapat menyelesaikan pendidikan tingkat dasar jumlahnya cukup tinggi. Hal ini hasil dari program pemerintah yang mewajibkan seluruh warga bangsa ini agar melek huruf. Tetapi penduduk yang bisa menyelesaikan pendidikan tingkat menengah dan sekolah lanjutan atas jumlahnya relatif kecil. Hal ini disebabkan, salah satunya program pemerintah

tentang wajib belajar sembilan tahun belum berjalan maksimal karena fasilitas pendidikan SLTP dan SLTA relatif kecil dibandingkan fasilitas pendidikan tingkat dasar. Kalaupun ada sekolah SLTP dan SLTA yang telah dibangun pemerintah hanya di Desa Tanjung Medang dan Titi Akar. Untuk sekolah swasta setingkat SLTP dan SLTA hanya ada di desa Kadur.

Tabel 2
Jumlah Sarana Pendidikan

NO	Nama Kelurahan/Desa	TK	SD	SLTP/MTS	SLTA/SMK/ M.Aliyah
1	Tanjung Medang	1	2	2	1
2	Teluk Rhu	1	1	0	0
3	Tanjung Punak	1	1	0	0
4	K a d u r	1	2	2	0
5	Titi Akar	1	5	2	1
TOTAL		5	11	6	2

Sumber : BPS Kecamatan Rupert Utara 2013

Setting sosial ekonomi

Sistem pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di Rupert Utara mayoritas bertumpu bidang pertanian dan perkebunan, disamping ada pula yang berprofesi sebagai nelayan sebagai ciri khas masyarakat yang tinggal di pinggir pantai. Ada pula yang bekerja sebagai buruh di industri panglo arang, beternak, dan berdagang Pulau Rupert dihuni beragam etnik atau suku seperti suku Melayu, Jawa, Bugis, Batak, suku Akit dan

lainnya. Khusus suku *akit* bermukim di Desa Tanjung Medang (dusun kampung Molek), Desa Titi Akar, Desa Hutan Ayu dan desa Suka Damai (Rupert Utara). Demikian pula ada di Kecamatan Rupert meliputi Desa Darul Aman (di dusun Pangkalan Durian, dusun Gunap dan dusun Saka), Hutan Panjang, Pancur Jaya, Dungun Baru; Kelurahan Tanjung Kapal (di dusun Rampang), dan kelurahan Batu panjang (di Dusun Parit Akit).

Tabel. 3
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencarian

NO	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Orang
1	Bidang Pertanian	225
2	Bidang Perkebunan	182
3	Bidang Peternakan	180
4	Bidang Perikanan	591
5	Bidang Kehutanan	124
6	Bidang Industri (panglo Arang)	34
7	Bidang Perdagangan	76
8	Bidang Jasa	26
9	PNS/TNI/Polri	48
10	Tenaga Honorer	9

Sumber : BPS Kecamatan Rupert Utara 2013

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Rupert Utara umumnya bermatapencarian pada sektor perikanan dan pertanian. Sebagian lain di sektor perikanan yaitu menjaring dan merawai ikan di laut, sebagai tenaga buruh dari pemilik modal yang umumnya dimiliki oleh etnik Cina atau miliki sendiri.

Keadaan sosial keagamaan

Di Kecamatan Rupert Utara masyarakatnya terdiri dari berbagai latar belakang agama, budaya dan etnik. Di era otonomi saat ini keragaman itu membawa dampak bahwa mereka memiliki

kebebasan berkreasi dan berekspresi bagi setiap kelompok agama, suku maupun budaya. Perlu dikembangkan prinsip kebersamaan dalam kehidupan kelompok yang beragam, sehingga mampu mengakomodasikan pluralitas agama dan budaya masyarakat. Pluralitas tersebut tidak semestinya dipandang sebagai suatu yang negatif, tetapi mesti dipandang sebagai suatu yang potensial bagi pengembangan sebuah masyarakat. Karena kedewasaan dalam bersikap dan bertindak suatu masyarakat perlu terus dikembangkan dengan tidak henti-hentinya berfikir rasional-objektif.

Tabel. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Pemeluk Agama	Jumlah	Prosentase
1	Agama Islam	8.289	54,46%
2	Agama Khatolik	22	0,15%
3	Agama Protestan	839	5,51%
4	Agama Budha	6.069	39,88%
5	Agama Hindu	0	0,00%
	Total	15.219	100,00%

Sumber : BPS Kecamatan Rupal Utara 2013

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah penduduk muslim berjumlah 8.289 orang atau 54.46% dari keseluruhan penduduk di Rupal Utara. Mereka mayoritas mendiami Desa Kadur, Teluk Rhu, Tanjung Punak, Putri sembilan, sementara di Tanjung Medang, Desa Titi Akar, Desa Suka Damai dan Desa Hutan Ayu umat Islam jumlahnya berimbang dengan jumlah suku Akit dan Cina yang mayoritas menganut agama Budha.

Pembauran antara suku Akit dengan etnik lain seperti Melayu, dan Jawa, atau

lainnya tidak otomatis mereka tertarik untuk memeluk Islam, mengingat dalam Islam banyak pantang larang seperti makan babi, berjudi, berjoget, mabuk-mabukan dan lainnya. Kedua kelompok muslim dengan akit berdasarkan sumber dari tokoh masyarakat setempat bahwa mereka sama-sama khawatir, takut dan cemas jika berbicara menyentuh masalah keyakinan, karena agama Islam identik dengan banyak aturan dan larangan semisal babi, dan anjing, padahal makanan itu tidak ada pantang larang bagi kelompok suku akit.

Tabel 5
Jumlah Sarana Ibadah

NO	NamaDesa	Masjid	Mushala	Gereja	Vihara/ Klenteng	Pura
1	Tanjung Medang	2	1	1	2	0
2	Teluk Rhu	3	2	0	0	0
3	Tanjung Punak	1	1	0	1	0
4	K a d u r	4	4	0	1	0
5	Titi Akar	3	4	4	2	0
	Total	13	12	5	6	0

Sumber : BPS Kecamatan Rupal Utara 2013

Sosial Budaya

Di Kecamatan Rupert Utara dapat dijumpai empat kebudayaan dominan yang menopang adat dan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Empat rumpun kebudayaan tersebut mewarnai konfigurasi budaya masyarakat di wilayah ini dengan beragam perbedaan mengingat terdapat perbedaan etnik, agama, adat, tradisi. Kebudayaan *pertama* adalah yang dimiliki oleh masyarakat Melayu dan Jawa yang diikat dengan adat resam yang bersendikan Islam, seluruh adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya dan ritualnya bersendikan agama. *Kedua*, kebudayaan yang dimiliki oleh suku Akit di mana pola kebudayaannya seperti sistem kepercayaan, sistem nilai, dan norma secara spesifik berbeda dengan budaya lain karena belum dipengaruhi oleh sistem kepercayaan atau agama-agama yang ada seperti Islam, dan Kristen.

Sebagian suku Akit secara formal mereka memeluk agama Budha, mengingat mereka lebih mudah berbaur dan berinteraksi dengan etnik Cina. Kalau pun ada pengaruh sistem nilai dan agama dari sistem kepercayaan etnik Cina, pada hakikatnya pengaruh kebudayaan masyarakat luar dalam masyarakat suku Akit masih belum dominan. Masyarakat suku *akit* masih eksis dan teguh dengan pelestarian nilai, norma dan adat-istiadatnya sendiri yang diwarisi nenek moyangnya. *Ketiga* adalah kebudayaan yang dimiliki etnik Cina yang bermukim di desa Titi Akar dan Tanjung Medang, mereka etnik pendatang ke pulau Rupert.

Dan *keempat* etnik Batak. Etnik Batak yang bermukim di Pulau Rupert termasuk pendatang baru, jika dibandingkan dengan etnik Akit, Melayu, Jawa dan Cina. Etnik Batak berasal dari wilayah Sumatra Utara, dari segi kebudayaannya juga memiliki beragam perbedaan dengan etnik-etnik yang ada baik dari segi bahasa, sistem sosial budaya, adat istiadat dan agama. Umumnya etnik Batak yang merantau di sini adalah mereka yang beragama kristen Protestan dan katolik. Mereka mendiami beberapa desa Titi akar, Hutan Ayu, dan Hutan Panjang.

Problematika Pembangunan Pulau terluar Rupert

Pulau Rupert direncanakan sebagai pusat pembangunan kepariwisataan dan agrobisnis oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis masa Bupati Herliyan Saleh. Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2009 M (*Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 15 Tahun 2008*) bahwa pulau Rupert akan dijadikan kawasan wisata unggulan, dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Riau. Desain program pembangunan pemerintah terhadap pulau Rupert yaitu menjadikan wilayah ini sebagai tujuan pariwisata dan agrobisnis patut didukung. Namun realisasi program yang dijalankan belum bisa dilihat dan dinikmati masyarakat secara nyata saat ini mengingat lambannya realisasi program tersebut. Padahal telah memasuki tahun keempat, seperti terlihat di pulau Rupert

belum mampu sebagai wilayah tujuan wisata karena sarana dan prasarana belum mendukung, termasuk belum adanya *sharing budget* dan *sharing program* antara pemerintah pusat dan propinsi dengan pemerintah Bengkalis.

Pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten sebenarnya telah membuat satu komitmen untuk membangun pulau Rupat sebagai salah satu pulau terluar baik dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) maupun dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan dituangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJPM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

1. Pemerintah pusat Dalam RPJPN menetapkan Pulau Rupat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pengembangannya dilakukan dari berbagai sektor, salah satunya dijadikan kawasan wisata nasional. Hal itu telah ditegaskan pada 15 Januari 2011 oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika mengunjungi Pulau Rupat bersama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar serta Gubernur Riau HM Rusli Zainal, rencana Pulau Rupat dijadikan kawasan wisata nasional telah masuk dalam tahap pembahasan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Program jangka menengah yang dilakukan pemerintah pusat diantaranya menjadikan Pulau Rupat

sebagai salah satu lokasi Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang direncanakan sejak tahun 2010. Kemudian berdasarkan kebijakan pemerintah Bengkalis lokasi ditentukan di Desa Pangkalan Nyirih sebagiannya masuk Desa Sungai Cingam. Hingga saat peneliti sampai di lokasi pangkalan Nyirih, baru dibuat plank besar menuju lokasi, dan patok-patok kawasan yang akan menjadi KTM. Masyarakat dan tokoh sekitar sangat berharap realisasi program pemerintah pusat Kota Terpadu Mandiri. Karena akan cepat berubah termasuk mengangkat perekonomian mereka. (*Wawancara*, Toyib, Tokoh Masyarakat, tgl 14-102014).

Pengembangan Pulau Rupat khususnya pembangunan KTM dicanangkan oleh Depnakertrans. Menurut Dirjen Pembinaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) Depnakertrans saat ia berkunjung ke pulau Rupat (tanggal 8 Oktober 2010), bahwa pembangunan KTM yang berada di kawasan perbatasan dilakukan untuk menegaskan kedaulatan bangsa, sehingga tidak diklaim oleh negara lain. Tujuan lain untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

2. Pemerintah Propinsi dalam RPJMD (*Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 15 Tahun 2008*) akan menjadikan pulau Rupat sebagai kawasan wisata

unggulan, dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Riau. Pemerintah Bengkalis dalam menindaklanjuti dengan program pembangunan jalan penghubung antara Batu Panjang di Kecamatan Rupert dengan Tanjung Medang (Kecamatan Rupert Utara). Pembangunan jalan ini sudah memasuki tahap tahun keempat, dan terus digesa proses pembangunannya. Namun hingga saat peneliti turun ke lapangan masih ada beberapa desa baru dalam tahap pengerasan dengan pasir batu. Program pemerintah kabupaten lain adalah membuat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berada di desa Tanjung Medang sebagai tempat pencatatan administrasi bagi pendatang yang berasal dari luar negeri. Ada pula pembangunan pelabuhan ro-ro di Tanjung Medang kecamatan Rupert Utara namun pengerjaan juga belum selesai. Program pembanguana ro-ro ini bertujuan sebagai sarana tempat bersadarnya kapal atau very baik yang datang dan keluar dari dalam maupun luar negeri, program ini pun masih dalam tahap pengerjaan dan belum selesai. Sedangkan ro-ro yang di Batu Panjang sudah bisa difungsikan.

Program pemerintah Bengkalis yang lain dalam mempercepat pulau Rupert sebagai wisata unggulan adalah membuat event-event penting yang bisa menarik pengunjung baik wisatawan domestik maupun luar

negeri seperti Vestival kompiang, Vestival seni, mandi Safar; dan lainnya. Kemudian mendorong swasta untuk membangun wisma-wisma dan sebagai tempat untuk menginap wisatawan pada saat ada event-event besar di sepanjang pantai berpasir putih di Teluk Rhu-Tj. Punak hingga Sungai Cingam.

Dari berbagai sumber yang peneliti dapatkan bahwa persoalan lambannya realisasi berbagai program tersebut, meski telah dilakukan koordinasi antara pemersintah pusat, daerah dan badan terkait dalam pembangunan pulau Rupert adalah persoalan kemauan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam sinergi mengalokasikan anggaran, seperti *sharing program* dan *sharing anggaran*. Kenyataan di lapangan bahwa sulitnya mendapatkan akses *sharing program* dan *sharing anggaran* antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat mengakibatkan lambannya realisasiasi program pembangunan di pulau Rupert tersebut.

Pemberdayaan suku Akit di Rupert

Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat suku *Akit* di pulau Rupert, umumnya tidak dibedakan dengan suku-suku lain yang tinggal di lingkungan tersebut. Pemerintah tidak memberi prioritas program pemberdayaan bagi suku Akit, padahal dalam realitas kehidupan mereka

bahwa suku akit cenderung memiliki kekhasan dalam perilaku, budaya dan lebih banyak yang kurang mampu secara ekonomi. Suku *akit* oleh banyak pihak masih dikategorikan dalam kelompok masyarakat tradisional atau Komunitas Adat Tertinggal (KAT) seperti *suku sakai, suku Akit, Talang mamak, suku laut, suku bonai*, yang tersebar di propinsi Riau.

Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah maupun LSM di kecamatan Rupa Utara antara lain : Program INBUP-PPIP (*Instruksi Bupati dan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan*); ADD (*Alokasi Dana Desa*); UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) ; Rumah Layak Huni; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas; bidan dan ambulans (semuanya adalah progra pemerintah Kabupaten). Selanjutnya pemberdayaan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat seperti penyuluhan Narkoba, AIDS dan HIV; penyuluhan kesehatan seperti imunisasi, pentingnya ASI; sanitasi lingkungan dan hidup bersih. Dari kalangan LSM ada pula program Indonesia Mengajar dikhususkan di Desa Titi Akar dan Hutan Ayu. Kemudian terdapat pula program PNPM Mandiri (*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*); Pamsimas (keduanya program pemerintah pusat).

1. Program INBUP-PPIP.

Program *Instruksi Bupati dan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan* (Inbup-PPIP) adalah program

pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan mengalokasikan anggaran Rp1 miliar/desa setiap tahun di seluruh desa di Kabupaten Bengkalis. Program ini ditangani langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMMPD). Dana hibah program Inbup-PPIP bertujuan untuk dipergunakan dalam pembangunan sarana-sarana peningkatan jalan lingkungan desa, dusun atau RT/RW, pembangunan turap penahan banjir skala kecil, pembangunan rumah layak huni (RLH). Penguatan infrastruktur pedesaan tersebut tetap dialokasikan dana dari APBD sebesar Rp 1 miliar per-desa pertahunnya untuk pembiayaan proyek skala kecil atau dikenal dengan penunjukan langsung (PL) karena nominalnya dibawah Rp 200 juta perkegiatan.

Program pendukung dari kegiatan Inbup-PPIP ini adalah harus terbentuknya satu lembaga yang disebut Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang berada di desa dan harus dibentuk di setiap desa sebelum dana dicairkan, termasuk harus adanya Tenaga Pedamping Desa (TPM) yang diseleksi dan diangkat oleh pemkab Bengkalis untuk program terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. OMS dan TPM mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari pihak pemerintah agar kegiatan Inbup-PPIP dapat berjalan

lancar seperti yang berkaitan dengan administrasi, sistem pelaporan, penatausahaan keuangan.

Dalam realisasi program Inbup-PPIP beberapa tahun berjalan ternyata mengalami banyak kendala seperti belum memenuhi unsur perencanaan yang matang; Karena itu dalam pelaksanaannya harus ada pengawasan yang ketat dari masyarakat. Sekiranya ada penyimpangan dari rencana semula masyarakat bisa dikomplain. Bila menyalahi ketentuan standart maka Kepala desa dan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang harus bertanggungjawab.

2. Program UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam).

Program pemberdayaan masyarakat jenis UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam). Program ini semula digagas oleh mantan Gubernur Riau HM Rusli zainal saat ia menjabat. Kelanjutannya pada tahun kedua diambil alih pemerintah Kabupaten Bengkalis. Program UED-SP telah berjalan 5 tahun di seluruh desa-desa di Bengkalis dalam membantu peningkatan perekonomian masyarakat di desa yang bersifat pinjaman lunak khususnya bagi usaha kecil. Namun Program UED-SP semula tahun pertama berasal dari APBD propinsi, selanjutnya empat tahun terakhir menjadi program kabupaten Bengkalis. Program UED-SP sudah mendapatkan hasil yang

mengembirakan. Selain penyaluran kredit lunak dan pengembalian dana yang berkelanjutan, masyarakat menjadi mandiri dalam menggali potensi usaha ekonomi di desa dalam beragam bentuk, dan roda ekonomi di desa-desa makin bergairah. UED-SP bisa menjadi program unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depannya.

Dari program Usaha Ekonomi Desa dalam bentuk simpan pinjam ini di masing-masing desa di kecamatan Rupat Utara terdapat perputaran uang antara kisaran 4 Miliar lebih. Uang tersebut dipinjamkan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha beragam jenis. Namun harus melengkapi syarat-syarat seperti menyerahkan borg (jaminan). Pinjaman pada tahun pertama dan kedua maksimum Rp. 20 juta sedangkan tahun ketiga dan keempat bisa maksimum Rp. 30 juta. Menurut Bapak Hariadi, S.Sos, M.Si bahwa keterlibatan masyarakat suku Akit yang ada di desa Hutan Ayu dalam Usaha simpan pinjam termasuk aktif. Karena mereka dalam beberapa tahun terakhir membuka kebun dan telah ditanam sawit, karet dan lainnya.

Bila masyarakat pengguna pinjaman lunak tidak dapat mengembalikan cicilan perbulan selama tiga bulan akan ada pembinaan dan teguran, hingga memasuki bulan keenam akan ada penyitaan terhadap aset yang dijaminkan. Untuk wilayah

desa-desa di kecamatan Rupert Utara tidak ada tunggakan hingga enam bulan, sehingga tidak ada proses penyitaan jaminan, Kecuali satu kasus di desa Tanjung Medang yang hampir memasuki tahap penyitaan, namun tetap saja ada kesempatan bagi peminjam bila ada kemauan untuk melunasi..

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Program ini adalah sinergi dengan program nasional dan propinsi bahwa setiap desa dialokasikan dana sebesar 1 Miliar untuk biaya pembangunan di desa berkaitan dengan sarana fisik sekala kecil seperti perbaikan irigasi, pengaspalan gang, perbaikan gedung yang tidak perlu ditenderkan. Kemudian ADD juga bisa digunakan untuk biaya operasional desa dan belanja rutin aparatur. ADD secara lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Permendagri 37/2007. Alokasi Dana Desa dikucurkan oleh pemerintah bertujuan untuk peningkatan pembangunan sarana fisik dan non fisik untuk mendorong partisipasi masyarakat. Prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung-jawab, dan harus melibatkan peran aktif masyarakat lokal. ADD merupakan bagian tak terpisahkan dari APBDes mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporannya.

Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Pertanggungjawaban ADD menyatu dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan yang dibiayai dari ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta evaluasi Pemerintah. Namun anggaran Alokasi Dana Desa yang di anggarkan pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2014 masing-masing desa mengalami penurunan sebagai akibat adanya pemekaran Desa yang semula berjumlah 102 desa menjadi sekitar 150-an desa pasca diresmikannya Bupati. Padahal penganggaran dana ADD ini sama seperti tahun 2013 yakni sebesar Rp120 miliar. Rata-rata pada tahun sebelumnya setiap desa menerima ADD paling kecil Rp1 miliar, sedang tahun 2014 turun sekitar Rp600 juta. Tetapi pembangunan di desa masih ditopang dari dana Inbup PPIP dan UED-SP. (*Wawancara*, Rahmat Yani, Humas Kec.Rupert Utara, 14-16-10-2014).

Desa sebagai institusi pemerintah level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan administrasi masyarakat, seperti KTP, KK, Akta Kelahiran,

pengurusan Surat keterangan Tidak Mampu, SKCK, SIUP, urusan pertanahan pembuatan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi), tetap melibatkan perangkat desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan dukungan sumber daya manusia, dana, maupun perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam PP 72/2005 tersebut juga telah mengatur sumber pembiayaan bagi Desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa. ADD merupakan kebijakan pemerintah yang tepat untuk kelangsungan Desa.

4. Program PAMSIMAS

Pamsimas adalah program pemerintah pusat melalui penyediaan bantuan secara langsung ke tingkat desa, namun tetap melibatkan pemerintah kabupaten. Pamsimas adalah program yang berada di Kementerian Pekerjaan Umum, dengan didukung lembaga pelaksana program lainnya, yakni Depkes, Depdagri dan Depdiknas Koordinasi Program dilakukan melalui Tim Pengarah yang diketuai BAPPENAS dan beranggotakan beberapa departemen dan kementerian terkait. Tim Pengarah akan dibantu oleh Tim Teknis, yang diketuai BAPPENAS dengan struktur dan tanggungjawab yang sama. Tim Teknis fokus pada seluruh aspek operasional program yang dibutuhkan dan bertanggungjawab untuk mengetahui efektifitas, efisiensi serta perubahan perilaku di masyarakat.

Program Pamsimas antara lain

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum, program perbaikan sanitasi. program Pamsimas yang dilakukan di beberapa desa di Rupert Utara adalah pembuatan Bak penampungan air, pralon-pralon penghubung menuju rumah sekitar, di desa yang tidak memiliki bak penampungan air, wilayah rawan kekurangan air saat musim kemarau tiba. Karakteristik wilayah pulau sering kekurangan air saat musim kemarau tiba termasuk Rupert. Bagi penduduk yang memiliki dana cukup mereka membuat tangki penampungan air hujan, untuk stok saat kemarau tiba. Tetapi bagi masyarakat tidak mampu hanya mengandalkan penampungan air seperti drum bekas atau lainnya. Oleh karena itulah program Pamsimas masuk di pulau Rupert khususnya desa miskin fasilitas air seperti di Desa Teluk Rhu desa Titi Akar dan desa Tanjung Medang.

Kemudian program peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, bertujuan untuk membantu masyarakat, dalam pencegahan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih yang mengakibatkan penyakit diare. Bentuk perwujudan bisa promosi hidup sehat ditujukan pada semua lapisan masyarakat, khususnya kaum wanita dan anak-anak. Sosialisasi hidup sehat dan bersih dilaksanakan melalui keluarga, institusi desa, sekolah, tempat ibadah,

karang taruna, PKK, seperti membuat iklan permanen di pinggir sekolah, dan lembaga lainnya.

5. PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007. Dan program ini merupakan *scaling up* (pengembangan lebih luas) dari program penanggulangan kemiskinan sebelumnya. PNPM Mandiri menjadi koordinasi dari program penanggulangan kemiskinan khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*).

Presiden SBY saat itu memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *pertama*, Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan; *Kedua*, Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk

kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat dan *Ketiga*, pendampingan masyarakat.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan *Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* (PMD), pada Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (*Corporante Social Responcibility*). Di Kecamatan Rupert Utara program PNPM Mandiri yang telah direalisasikan antara lain adalah pembangunan turap di pinggiran sungai Desa Titi Akar; dan Pembangunan Gedung MDA di Tanjung Punak serta di tempat lainnya.

6. Program Indonesia Mengajar

Program Indonesia Mengajar semula dirintis Rektor Universitas Paramadina DR. Anies Rasyied Baswedan, MA (Mendiknas RI priode 2014-2019 M). Program Indonesia Mengajar banyak melahirkan kisah pengajar-pengajar muda penuh inspiratif bagi murid-murid di desa yang ditujunya. Program ini berpusat di Jakarta, dengan cara merekrut pengajar muda yang mau ditempatkan di seluruh pelosok tanah air antara 1-2 tahun. Ada dua kali dikirim pengajar muda dua orang selama 2013-2014 di Kecamatan Bantan.

Sebelumnya Program Indonesia Mengajar telah mengirim pengajar muda ke kecamatan Rupert Utara tahun 2010-2011 tepatnya di Desa Titi Akar dan desa Hutan Ayu. *Pertama*, Agus Rachmanto tahun 2010. Ia adalah orang Kebumen, lulusan dari Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM Yogyakarta tahun 2008. *Kedua*, Wilbrodus Marianus, alumni Fakultas Teknik Informatika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2008 dan telah bekerja sebagai video jurnalis disalah satu Televisi Nasional ia terjun di program Indonesia Mengajar tahun 2011. Keduanya ditempatkan di Desa Titi Akar Rupert Utara karena sama-sama bertekad membuka akses pendidikan bagi anak-anak terisolir.

Hasil pantauan pemerintah kabupaten Bengklis, program Indonesia h banyak merubah pandangan anak-anak suku akit di kecamatan Bantan dan Rupert. Dulu anak-anak suku *akit* kurang termotivasi untuk sekolah apalagi melanjutkan ke jenjang SLTP bahkan SLTA. Saat ini motivasi mereka kian bangkit dan berupaya melanjutkan ke jenjang SLTA/SMK. Sejak tahun 2012 pemerintah kabupaten telah mendirikan SMKN Perkebunan di desa Titi Akar. Sekolah SMKN Perkebunan ini setiap tahun menerima satu kelas dan ada beberapa anak Suku *akit* termotivasi belajar di sini karena dekat dari rumah. Padahal

mereka tak mampu membayar uang buku maupun baju seragam sekolah sering di keluhkan oleh majlis guru.

Dari program *Indonesia mengajar* ternyata menoreh banyak peningkatan program pendidikan sekaligus memacu anak-anak belajar di daerah terpencil di Bengklis. Pada tahun 2014 Bupati membuat program *Bengklis mengajar*, yang idenya persis sama mengadopsi program *Indonesia Mengajar*. Salah satu strateginya adalah merekrut generasi muda yang punya kemauan untuk menjadi guru di daerah terisolir, dan di seleksi secara ketat sehingga yang terpilih adalah mereka yang punya komitmen tinggi dalam memajukan pendidikan. Angkatan pertama tahun 2014 ini direkrut 16 guru dari generasi muda dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Mereka ditempatkan di berbagai desa terisolir di Kabupaten Bengklis salah satunya di Kecamatan Rupert Utara yaitu di Desa Titi Akar, Hutan Ayu, Kadur dan Tanjung Punak.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan *Pertama*, bahwa kebijakan pembangunan pulau Rupert sebagai pulau terluar masih terkesan berjalan lamban dan belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Salah satu faktor kendalanya adalah tidak adanya *sharing program* dan *sharing budget* antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Diantara program prioritas saat ini di pulau Rupert oleh pemerintah

pusat dalam RPJPN adalah menetapkan Pulau Rupert sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pengembangannya untuk dijadikan kawasan wisata nasional. Bentuk programnya salah satunya membuat Kota Terpadu Mandiri (KTM) sejak tahun 2010 berpusat di Desa Pangkalan Nyirih. Realisasinya masih tersendat-sendat.

Pemerintah kabupaten sedang menggesa pembangunan pelabuhan Roro di Desa Tanjung Medang; membangun akses jalan antara Batu Panjang di Kecamatan Rupert dengan Tanjung Medang kecamatan Rupert Utara, namun hingga saat ini belum selesai dan berjalan lamban; pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di desa Tanjung Medang; mendorong swasta membuat wisma; *home stay* di sepanjang pinggiran pantai berpasir putih antara Teluk Rhu hingga Desa Tanjung Punak 17 KM; membuat event-event yang bisa menarik wisatawan seperti festival kompiang, festival seni, mandi Safari; dan lainnya.

Kedua, adalah Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat di pulau Rupert secara umum, tidak ada prioritas program pemberdayaan kepada suku *Akit*. Padahal dalam realitas kehidupan suku *akit* cenderung lemah dari banyak hal bahkan masih mewarisi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan di banding suku lain. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah maupun LSM di pulau Rupert : Program INBUP-PPIP (*Instruksi Bupati dan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan*); ADD (*Alokasi*

Dana Desa); UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) ; RLH; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas; bidan desa dan ambulan. Selanjutnya pemberdayaan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat seperti penyuluhan Narkoba, AIDS dan HIV; penyuluhan kesehatan seperti imunisasi, pentingnya ASI; sanitasi lingkungan dan hidup bersih. Adapun pemerintah pusat antar lain program PNPM Mandiri (*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*); Pamsimas (keduanya program pemerintah pusat). Dari kalangan LSM ada pula program Indonesia Mengajar yang dikhususkan hanya Desa Titi Akar dan Hutan Ayu. Saat ini diadopsi pemerintah Bengkalis menjadi program Bengkalis Mengajar.

Daftar Kepustakaan

- Chaidar Alwasilah, 2002, *Dasar-Dasar Merancang dan Melaksanakan Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Pustaka Jaya, 2002.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung; Refika Aditama, 2010.
- Friedman,F, *Empowerment: The Politic of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell, 1998.
- Garna, Judistira, K. *Masyarakat Baduy dan Silivangi*, (Depsos RI – Gramedia. Jakarta, 1999.
- Ghofur, Abdul & Hasbulah, *Transformasi sosio-kultural masyarakat Suku Asli*

- (akit) di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Laporan Penelitian : LPPM UIN Suska Riau, 2007.
- Hamidi, UU, *Islam dan masyarakat Melayu di Riau*, Pekanbaru, UIR Pres, 1996.
- Harian Pagi *Riau Pos*, tanggal 27 April 2013
- Husni Thamrin, *Sakai, Kekuasaan, Pembangunan dan Marginalisasi*, (Pekanbaru : Suska Press, 2003.
- http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/program_pembangunan_kawasan_edisi.pdf, diakses tanggal 20 Februari 2014
- [http://www.kebijakan_dan_penataan_pulau_terluar_oleh_BAKOSURTANAL, Rudolf W Matindas, & Sobar Sutisna, M.Surv](http://www.kebijakan_dan_penataan_pulau_terluar_oleh_BAKOSURTANAL,_Rudolf_W_Matindas,_&_Sobar_Sutisna,_M.Surv). Diakses tanggal 16 Februari 2014
- <http://www.kompasberita.com/2011/11/willy-memilih-mengabdikan-kepulauan-rupat> Diakses tanggal 8 September 2014.
- <http://sitasaja.blogspot.com/2011/12/kisah-para-pengajar-muda-dalam-buku.html> diakses 8 september 2014.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta; Cides, 1996.
- Kontjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1992.
- Liliweri, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya* Yoyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Lauer, Robert, *Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Mathew Miles & Hubermen Micahel, *Analisis data Kualitatif*, terjemahan (Jakarta : UI Press, 1992.
- Moelong Lexy, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mohamad Zen, *Orang Laut: Studi Etnopedagogi*, (Jakarta: Yayasan Bahari Nusantara, 2006.
- Mulyana, Dedi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosda Karya, 2002.
- Ningrat, Kuncoro, 2001, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: LP3ES, 2002.
- Peraturan Daerah Prov. Riau No. 15 Tahun 2008 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2008-2013*
- Porter, Richard & samover, Lary, 1985, *Intercultur Communication, A reader*, California; Wardwath Publishing, 1985.
- Ralahalu Karel Albert, *Pembangunan Daerah Kepulauan : Menjadikan Maluku Sebagai Daerah Industri Barbasis Sumber Daya Kelautan Kompetitif di Indonesia*, PT. Bintang Ilmu, Jakarta : Bintang Ilmu, 2009.
- Rinnusu, *Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah*, makalah Pelatihan Anggaran Responsif Gender, 2014.
- Sri Sumantri, HRT, 2008, *Otonomi Daerah*, (LP3; Jakarta).
- Suparlan, Parsudi, *Orang Sakai di Riau-Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat*. Rineka Cipta: Jakarta, 2006.